JURNAL EL TARIKH
JOURNAL OF HISTORY, CULTURE AND CIVILIZATION
Department of Historical Islamic Civilization Faculty of Adab
UIN Raden Intan Lampung

P-ISSN: 2774-7999 E-ISSN: 2774-8723
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/eltarikh/index
DOI: http://dx.doi.org/10.24042/jhcc.v4i1.8926

Kemunculan Perbankan Modern dan Peranannya dalam Perekonomian Menjelang Keruntuhan Turki Utsmani (1847-1923)

The Development of Modern Banking and Its Role in the Economy during the Collapse of the Ottoman Empire (1847-1923)

Anwar Firdaus Mutawally*[1], A. Toto Suryana Afriatin[2], Ganjar Eka Subakti[2]
[1]Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Padjadjaran
[2]Program Studi Pendidikan Ilmu Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia.
*Coresponding author: anwarfirdausmutawally@gmail.com
Submit: 03 April 2021 Revised: 18 April 2023 Accepted: 02 Mei 2023 Published: 20 Mei 2023

Abstract

This study describes the development of modern banking in the Ottoman Empire between 1847-1923. This study uses historical methods and library research research techniques. The results showed that there were five banks that played an important role in the economy of the Ottoman Empire, namely Banque de Constantinople, Ottoman Bank, Banque Imperiale Ottomane (BIO), Ziraat Bank, and Deutsche Bank. From 1847 to 1923, banks in the Ottoman Empire played various roles, from commercial banks, central banks, public facility investors, assistants in the formation of foreign debt payment institutions (OPDA), farmer credit assistance and so on. Apart from that, through banking, the Ottoman Empire also made it possible for other European countries to cooperate in the international economy.

Keywords: *Development, Bank, Ottoman Empire.*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan bank modern di Turki Utsmani antara tahun 1847-1923. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan teknik penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian Turki Utsmani yakni Banque de Constantinople, Ottoman Bank, Banque Imperiale Ottomane (BIO), Bank Ziraat, dan Deutsche Bank. Sejak tahun 1847 hingga 1923, bank-bank di Turki Utsmani memiliki peran yang beragam mulai bank umum, bank sentral, investor fasilitas umum, pembantu pembentukan lembaga pembayaran utang luar negeri (OPDA), bantuan kredit petani dan lain sebagainya. Selain itu melalui perbankan, Turki Utsmani juga memungkinkan untuk kerja sama perekonomian internasional.

Kata Kunci: Perkembangan, Bank, Turki Utsmani

PENDAHULUAN

Bank secara etimologis berasal dari Bahasa Prancis Banque yang berarti bangku. Bank adalah badan usaha yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Keberadaan bank berperan penting dalam roda perekonomian terlebih untuk meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan adanya bank, terjadi penyaluran dana pada sektor riil yang menggerakan roda perekonomian. Penyaluran dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha berskala mikro, kecil, menengah, hingga besar. Dengan ketersediaan dana dari bank maka pembangunan sarana prasarana dan usaha masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih cepat (Geo, Desya, & Prisilia, 2023). Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006), terdapat tiga fungsi bank yakni sebagai agent of trust (tempat penyimpanan dan pengiriman uang), agent of development (tempat kegiatan investasi), dan agent of service (tempat penitipan barang berharga).

Kegiatan perbankan memiliki sejarah panjang dan jejaknya dapat diketahui hingga masa peradaban Mesopotamia kuno. Berdasarkan kode yang dibuat Raja Hammurabi (1792-1750 SM), diketahui bahwa pada saat tersebut masyarakat Babilonia telah melakukan kegiatan simpan pinjam dalam bentuk bahan pangan dan komoditas lainnya (Kurylowicz, 2017). Saat tersebut dalam perbankan masyarakat Babilonia dikenal istilah yang disebut Igibi dan Maraschu. Igibi digunakan untuk menyebut kreditur, sedangkan Maraschu digunakan untuk menyebut debitur. Setelah jatuhnya Kota Babilonia ke tangan Persia pada abad ke-6 SM, kegiatan perbankan kemudian menyebar ke peradaban-peradaban besar lainnya seperti Persia, Yunani, dan Romawi (Kurylowicz, 2017).

Pada abad ke-8 Masehi, umat Islam mulai mengenal sistem perbankan. Ketika itu Dinasti Abbasiyah memperkenalkan lembaga perbankan yang disebut Sarraffin. Saraffin pada masa Dinasti Abbasiyah merujuk pada lembaga multifungsi yang bertugas sebagai juru tulis keuangan, ahli keuangan, peminjam uang, pemeriksa otentitas uang, bendahara, pegawai pajak, tempat penukaran uang, hingga lembaga perkumpulan saudagar. Memasuki abad ke-10, lembaga Saraffin semakin dikenal di dunia Islam, terlebih berkat Pangeran Saif al-Dawla al-Hamadani yang menyebarkan saraffin ke seluruh jazirah Arab. Namun sejak kemunduran negara-negara Islam akibat berbagai faktor pada abad ke-12 Masehi. Pengaruh Saraffin semakin berkurang, dan perkembangan perbankan di dunia Islam tersendat (Alharbi, 2015).

Perbankan modern pertama kali dikenal di Eropa sejak abad ke-13 masehi. Para pedagang Italia yang terinspirasi aktivitas Saraffin kemudian mendirikan bank dengan tujuan simpan-pinjam dan penukaran mata uang asing. Para bankir melakukan kegiatan simpan pinjam dengan nasabahnya di bangku dengan meja bertaplak hijau yang disebut Banca. Istilah Banca ini kemudian diserap dalam Bahasa Prancis Banque yang kemudian diserap kembali dalam bahasa Inggris Bank (Hossain, 2014). Pada tahun 1250 masehi tercatat terdapat 80 bank di kota Florence yang menyediakan perbankan bagi masyarakat Italia. Keberhasilan Bank-bank di Florence dalam menjalankan usahanya mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk mendirikan bank di negaranya masing-masing. Beberapa diantaranya seperti Bank Barcelona (1401) di Spanyol, Bank Amsterdam (1609) dan Bank Rotterdam (1653) di Belanda, bank Hamburg (1619) di Jerman serta Banque Générale di Prancis pada tahun 1716 (Kurylowicz, 2017).

Abad ke-13 Masehi menjadi tahun penting bagi sejarah Islam, sebab pada masa tersebut Kesultanan Turki Utsmani lahir menjadi panji baru umat Islam pasca runtuhnya Dinasti Abbasiyyah. Kesultanan Turki Utsmani pada perkembangannya menjadi salah satu dari tiga kerajaan besar modern Islam bersama Dinasti Safawiyah yang didirikan pada abad ke-16 di Persia, dan Dinasti Mughal yang didirikan pada abad ke-16 di India. Kesultanan Turki Utsmani mengalami kemajuan pesat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya pada masa Sultan Muhammad al-Fatih (1451-1483) dan Sultan Sulaiman al-Qanuni (1520-1566) (Yatim, 2014).

Lembaga perbankan di Turki Utsmani telah dikenal sejak abad ke-15 masehi dengan sebutan vakif. Lembaga vakif dikelola oleh para bankir yang disebut sebagai Sarraf. Vakif menyediakan kegiatan simpan pinjam bagi penduduk kota dan perkampungan di wilayah kesultanan. Meskipun demikian, dalam praktiknya para sarraf seringkali menjalankan kegiatan

perbankan yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama melakukan pinjaman dengan suku bunga yang besar setiap tahun. Keberadaan para sarraf mulanya mendapatkan pertentangan dari para ulama Utsmani dan mereka meminta pada sultan untuk menghentikan aktivitas para sarraf. Namun ide tersebut tidak didengar oleh pemerintah dan para sarraf menyebar ke berbagai penjuru wilayah negeri (Pamuk, 2004).

Memasuki abad ke-18 masehi, para Sarraf di Galata, Istanbul membentuk komunitas bankir modern yang disebut Galata Banker. Komunitas ini terbentuk sebagai dampak dari berkembangnya perbankan modern di negara-negara Eropa. Tujuan komunitas ini ialah untuk mendirikan perbankan modern bergaya Eropa di wilayah kesultanan. Galata Banker sebagian besar diisi oleh bankir non-muslim seperti sarraf Yahudi dan Armenia. Pada mulanya Galata Banker menjalankan aktivitasnya tanpa instansi perbankan yang jelas, hal ini karena tidak adanya perbankan modern di Utsmani. Namun setelah memasuki abad ke-19, aktivitas Galata Banker semakin intensif, sehingga menarik minat investor Eropa untuk berinvestasi pada usaha perbankan. Menyadari kondisi ekonominya yang tertinggal, sultan Utsmani melakukan reformasi untuk mengejar ketertinggalan tersebut (Tuncsiper, Tay, & Bayramoglu, 2007).

Pada tahun 1839, Sultan Abdulmejid mengesahkan gerakan Tanzimat di Turki Utsmani yang bertujuan untuk reformasi berbagai aspek kehidupan kesultanan mulai politik hingga ekonomi. Periode tanzimat menjadi titik penting dalam sejarah Utsmani, sebab pada masa ini terjadi perubahan paradigma politik kesultanan yang mulanya di atur oleh hukum Islam menjadi hukum sekuler bergaya Eropa. Pada periode ini juga menjadi awal mula kemunculan perbankan modern di Turki Utsmani. Tanzimat menjadi pemicu sekularisme dan masuknya westernisasi di wilayah negara. Dampak gerakan Tanzimat di bidang ekonomi yakni didirikannya perbankan-perbankan multinasional di Utsmani, dan pembentukan bank nasional (Dzuhryansyah, 2014). Meskipun demikian, modernisasi ekonomi justru tidak mengembalikan pamor kesultanan, akan tetapi menjatuhkan Utsmani kedalam kebangkrutan pada tahun 1876 dan mendapatkan hinaan sebagai "pesakitan dari Eropa" hingga masa keruntuhannya (Worringer, 2004).

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan bank nasional dan swasta di Turki Utsmani, serta apa saja peran bank-bank tersebut dalam perekonomian negara. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas perkembangan bank modern nasional dan swasta di Kesultanan Turki Utsmani antara tahun 1847 sampai 1923. Tahun 1847 dipilih sebagai tahun awal penelitian dengan didirikannya bank Banque de Constantinople. Sedangkan tahun 1923 dipilih sebagai akhir tahun penelitian dengan bubarnya Kesultanan Turki Utsmani. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah 1) Apa saja bank yang berkembang di Turki Utsmani pada tahun 1847-1923?; 2) Bagaimana perkembangan bank di Turki Utsmani pada tahun 1847-1923? 3) Bagaimana peran bank di Turki Utsmani pada masa-masa tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses untuk menguji dan menganalisis kritis rekaman peninggalan masa lampau termasuk didalamnya metode menggali, memberikan penilaian, mengartikan, serta menafsirkan fakta-fakta masa lampau guna dianalisis dan ditarik kesimpulannya dari peristiwa tersebut (Gottschalk, 1986). Metode sejarah terdiri dari empat tahap yakni pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (kritik eksternal dan internal), interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi) (Sjamsuddin, 2012). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui library research atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan proses pencarian informasi terkait topik kajian dengan sumber-sumber seperti arsip, dokumen, buku, jurnal, catatan, dokumentasi, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya Simanjuntak dan Sosrodiharjo (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Turki Utsmani Pra-Kebangkrutan

Pada tahun 1839, Sultan Abdulmejid mengesahkan reformasi Tanzimat yang diprakarsai oleh mendiang ayahnya yakni Sultan Mahmud II. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaharui Turki Utsmani dari berbagai aspek mulai politik, militer, sosial budaya, hingga ekonomi. Reformasi ini dilakukan bukan tanpa sebab, pada masa tersebut kondisi Turki Utsmani berada pada kondisi yang sangat tertinggal dibandingkan negara-negara Eropa lainnya terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perlu langkah baru untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Setelah reformasi disahkan, pemerintah Utsmani merancang tiga program reformasi ekonomi yakni pembentukan bank sentral, penghentian monopoli perdagangan dalam negeri, dan peluncuran mata uang modern (Karademir, 2007; Pamuk, 2004).

Kebijakan pertama yang berhasil diimplementasikan pemerintah Utsmani ialah penghentian monopoli perdagangan dalam negeri. Setelah reformasi diterapkan pada tahun 1839, pemerintah Utsmani menghentikan monopoli perdagangan dalam negeri yang telah dilakukan selama berabad-abad. Dengan dihentikannya monopoli perdagangan dalam negeri, para wiraswasta dapat leluasa mendirikan usahanya di Turki Utsmani, dampaknya investor dari dari dalam negeri maupun negara-negara Eropa lainnya dapat leluasa mendirikan usahanya di wilayah kesultanan. Memanfaat kemudahan yang ditawarkan, para investor Eropa mulai mendirikan usahanya di Turki Utsmani, bahkan beberapa diantaranya memiliki niat untuk mendirikan usaha perbankan di wilayah kesultanan.

Kebijakan kedua yang berhasil diimplementasikan ialah peluncuran mata uang modern. Sebelum reformasi, Turki Utsmani menggunakan mata uang emas dan perak yang disebut Dinar dan Dirham. Pada tahun 1840, pemerintah Utsmani mengumumkan peluncuran mata uang baru yang disebut Lira Utsmani (Ottoman Lira) atau disebut juga Kaime. Lira Utsmani merupakan mata uang yang terbuat dari kertas dan direncanakan menggantikan mata uang logam mulia. Namun upaya tersebut mengalami kendala, sebab pemerintah belum memiliki mitra yang bersedia membantu pasak mata uang Lira Utsmani. Upaya pasak mata uang dapat dilakukan lima tahun kemudian. Pada tahun 1845, dua bankir Eropa di Galata yakni J. Alléon dan Th. Baltazzi meminta izin pada Sultan untuk mendirikan bank swasta modern di kesultanan. Untuk melancarkan perizinan usahanya, kedua bankir ini berinisiatif membantu pemerintah Utsmani dalam menentukan nilai tukar Lira Utsmani. Hasilnya ditentukan bahwa nilai tukar Lira Utsmani ialah 1.1 Lira Utsmani (110 Kurus Kaime) setara dengan 1 Poundsterling (Tuncsiper et al., 2007).

Setelah dua kebijakan dapat dilaksanakan, kebijakan terakhir yang hendak diimplementasikan pemerintah Utsmani ialah pembentukan bank sentral modern. Bank sentral diperlukan pemerintah Utsmani untuk mengatur kebijakan moneter kesultanan mulai mengatur stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, hingga sistem finansial secara keseluruhan. Pembentukan bank sentral merupakan kebijakan yang paling lama diimplementasikan dan upaya tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga berhasil dan stabil. Berikut merupakan upaya-upaya pemerintah Utsmani dalam mendirikan bank sentral modern.

Seusai membantu pemerintah Utsmani mengatur pasak mata uang Lira Utsmani, J. Alléon dan Th. Baltazzi mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendirikan bank modern pertama di Turki Utsmani. Keduanya kemudian mendirikan bank swasta bernama Banque de Constantinople di Istanbul pada tahun 1847. Meskipun tujuan awalnya ialah sebagai bank umum yang melayani simpan pinjam. Pemerintah Utsmani memberikan mandat pada keduanya agar Banque de Constantinople dijadikan bank sentral kesultanan pada tahun yang sama. Kiprah Banque de Constantinople sebagai bank sentral tidak berlangsung lama, krisis ekonomi yang melanda Eropa pada tahun 1852 menyebabkan devaluasi nilai tukar Lira Utsmani dan berkurangnya minat investor untuk berinvestasi pada bisnis perbankan. Akibatnya Banque de Constantinople pailit dan dilikuidasi pemerintah (Pamuk, 2004; Tuncsiper et al., 2007). Meskipun mengalami kegagalan, berdirinya Banque de Constantinople menjadi motivasi bagi pemerintah Utsmani untuk mendirikan bank sentral yang lebih stabil.

Upaya pembentukan bank sentral kembali dilakukan pada tahun 1853, tepatnya beberapa bulan sebelum pecahnya Perang Krimea (1853-1856). Saat itu mantan menteri keuangan Prancis, Trouve-Chauvel, menemui Sultan Abdulmejid untuk menawari bantuan pendirian bank sentral yang stabil di Turki Utsmani. Mendengar bantuan tersebut, sultan menyetujui tawaran tersebut dan ia juga berharap agar bank sentral ini juga dapat digunakan sebagai bank umum di wilayah kesultanannya. Setelah melakukan pertemuan, keduanya sepakat untuk mendirikan bank sentral baru bernama Banque Nationale de Turquie atau National Bank of Turkey. Bank ini direncanakan akan menjadi bank sentral sekaligus bank umum. Meskipun demikian, rencana tersebut gagal terwujud karena pada bulan Oktober 1853 terjadi Perang Krimea yang melibatkan Turki Utsmani, Prancis, dan Inggris melawan Rusia (Karademir, 2007).

Untuk membiayai keperluan perang, pemerintah Utsmani melakukan pinjaman jangka pendek pada sarraf Galata Banker. Namun pinjaman yang diberikan para sarraf memiliki suku bunga sampai 12% per bulan dan suku bunga terus meningkat setiap bulannya. Karena perang Krimea mengosongkan kas negara, pada tahun 1854 pemerintah Utsmani meminta pertolongan pada negara-negara Eropa untuk diberikan bantuan finansial guna keperluan perang (Saygili, 2009). Prancis dan Inggris sebagai sekutu perang bersedia membantu memenuhi kebutuhan finansial perang Utsmani dalam bentuk pinjaman luar negeri (Karademir, 2007). Pinjaman pertama Utsmani diperoleh dari perusahaan finansial Dent Palmer (Inggris) dan Goldsmith and Company (Prancis) dengan nominal sebesar £2.000.000. Alasan yang mendorong pemerintah Utsmani melakukan pinjaman ialah untuk membiayai Perang Krimea yang memakan kas negara, serta melunasi pinjaman dalam negeri yang sebelumnya diperoleh dari Bankir Galata (Bulutekkin, 2016).

Pada tahun 1856, Turki Utsmani beserta sekutunya berhasil memenangkan Perang Krimea. Namun Sultan Abdulmejid menyadari bahwa banyak permasalahan ekonomi dan politik di kesultanan yang perlu diselesaikan. Pada segi politik, banyak suku bangsa di wilayah kesultanan terutama yang beragama non-muslim berusaha melepas diri dari Turki Utsmani. Sedangkan dari sisi ekonomi, kesultanan mengalami ketertinggalan ekonomi karena segregasi yang terjadi antara kaum Muslim dan non-Muslim. Melihat keberhasilan hukum yang digunakan Prancis, Sultan Abdulmejid menyiapkan dekrit baru untuk mengatasi hal tersebut. Pada 18 Februari 1856, Sultan Abdulmejid mengumumkan dekrit Islahat Fermani. Dekrit ini berisi keputusan sultan untuk menghapus jizyah dan pengakuan kesetaraan rakyat muslim dan non-muslim di wilayah Turki Utsmani. Selain itu sultan juga menunjukkan keinginan serius untuk mendirikan perbankan modern di negaranya setelah melihat keberhasilan Bank of Egypt (Mesir) yang dikelola bankir Inggris. Melihat proyek besar untuk bekerja sama dengan sultan, serta kemudahan yang ditawarkan setelah penghapusan jizyah.

Pada Maret 1856, banyak investor Eropa yang berdatangan ke Istanbul untuk mendirikan usaha perbankan, bahkan ada juga bersedia membantu pemerintah Utsmani dalam mendirikan bank sentral (Karademir, 2007). Pada bulan April 1856, beberapa perusahaan besar Inggris dan Prancis yakni Keluarga Rothschild, Pereire Bersaudara, dan Glyn, Mills & Co. meminta izin pada pemerintah Utsmani untuk mendirikan bank swasta di wilayah kesultanan. Mereka kemudian memperoleh izin pada tanggal 24 Mei 1856. Sebelum perusahaan-perusahaan ini mendirikan banknya masing-masing di wilayah kesultanan, Menteri Luar Negeri Utsmani Fuad Pasha melakukan pertemuan dengan duta besar prancis Thouvenel untuk membahas kembali rencana pembentukan bank sentral. Akhirnya keduanya sepakat untuk mendirikan bank sentral dengan menggabungkan investor Inggris dan Prancis. Hal ini dilakukan guna mencegah para investor gulung tikar dan menghindari persaingan tidak sehat antara para investor. Karena keputusan ini, perusahaan-perusahaan tersebut kemudian digabungkan kedalam satu bank besar bernama Ottoman Bank.

Proses pembentukan bank sentral tidak berjalan mulus karena para investor meragukan keamanan dana yang mereka investasikan. Pada bulan Desember 1856, salah satu investor Ottoman Bank bernama Austen Henry Layard mengajukan saran pada pemerintah agar bank sentral berkedudukan di Istanbul dengan pengawasan dua komite luar negeri di London dan Paris. Menurut rencananya, komite luar negeri bertugas untuk mengawasi investasi asing di Eropa. Selain itu bagi Layard manajemen bank bukan urusan para investor melainkan urusan

para pejabat Utsmani, mereka hanya mengawasi mereka sebagai supervisor. Sedangkan satu investor lainnya bernama Joseph Paxton memberikan usulan yang hampir serupa dengan Layard hanya saja dalam segi manajemen, pemerintah Utsmani bebas menunjuk investor sebagai gubernur jenderal bank sentral. Ide Paxton yang kemudian disetujui oleh wazir dan sultan. Pada tahun 1858, berdiri bank sentral sekaligus bank umum bernama National Bank of Turkey (NBT). Upaya NBT sebagai bank sentral hanya berlangsung selama tiga tahun, hal ini disebabkan karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1861 menyebabkan NBT mencetak lebih banyak Lira Utsmani. Akibatnya terjadi inflasi yang parah di kesultanan dan terjadi devaluasi besar pada nilai tukar Lira Utsmani. Karena hal tersebut, NBT terpaksa berhenti beroperasi.

Pada bulan Juni 1861, Sultan Abdulmejid meninggal dunia. Kepemimpinan kesultanan kemudian digantikan saudaranya yang bernama Abdulaziz. Setelah Sultan Abdulaziz naik tahta pada tahun yang sama, ia kemudian mengangkat Fuad Pasha yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri menjadi wazir kesultanan (Eldem, 2005). Langkah pertama yang dilakukan Sultan Abdulaziz untuk mengatasi inflasi warisan Sultan Abdulmejid ialah melakukan pinjaman kepada Bank Deveaux and Co. di London sebesar £8.000.000. Berkat pinjaman tersebut, inflasi dapat ditekan dan seluruh uang Lira Utsmani warisan Sultan Abdulmejid dapat ditarik peredaran sejak tahun 1862 (Karademir, 2007).

Setelah kondisi perekonomian kesultanan membaik, Sultan Abdulaziz memerintahkan Fuad Pasha untuk meneruskan kembali proyek bank sentral yang mangkrak. Pada bulan Desember 1862, Fuad Pasha melakukan pertemuan dengan Pereire bersaudara (pimpinan Credit Mobilier) dan pimpinan Ottoman Bank untuk membicarakan kembali upaya pendirian bank sentral kesultanan. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa bank baru akan bergerak sebagai bank sentral dan juga akan bergerak sebagai bank umum. Selain itu terdapat kesepakatan untuk menamai bank sentral Utsmani dengan nama Banque Imperiale Ottomane (BIO). Hasil keputusan ini disetujui oleh menteri-menteri kesultanan dan Sultan Abdulaziz menandatangani keputusan tersebut pada 4 Februari 1863 (Clay, 1993).

BIO memiliki posisi yang unik dalam perekonomian Kesultanan Turki Utsmani, hal ini karena BIO pada satu sisi bersifat sebagai bank sentral dan pada sisi lainnya sebagai bank umum yang menyediakan layanan simpan pinjam bagi masyarakat biasa. Selain itu, dari segi kepemilikan, BIO juga tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Utsmani melainkan juga melibatkan investor Prancis, dan Inggris. Struktur organisasi perusahaan ini diketuai oleh Direktur Jenderal yang disebut Direction Generale. Direktur Jenderal memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya perbankan dan sebagai penghubung para investor Eropa dengan pemerintah Utsmani. Meskipun pemerintah Utsmani secara hukum berkuasa atas BIO, pada kenyataannya Direction Generale justru sepenuhnya diatur komite bank di Prancis dan Inggris. Sehingga untuk menerapkan kebijakan, Direction Generale perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada komite-komite tersebut (Clay, 1994). Menurut Eldem (2005). BIO diberikan beberapa kewajiban dan hak-hak khusus oleh pemerintah Turki Utsmani, diantaranya ialah:

1. BIO memiliki kewajiban untuk mencetak uang Lira Utsmani.
2. BIO diberi kewajiban untuk mengatur urusan kas negara, pungutan pajak, dan pengaturan pembayaran utang negara di bawah naungan kementrian keuangan.
3. BIO harus menyediakan kredit jangka pendek dengan bunga rendah kepada pemerintah pusat.
4. BIO bertindak sebagai agen keuangan pemerintah baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga, BIO memiliki hak khusus sebagai agen pembayaran utang dalam negeri, utang luar negeri, dan perencana pinjaman baru. Sebagai imbalan kegiatan tersebut, BIO menerima komisi 1% dari jumlah utang yang ditanganinya beserta tunjangan sebesar 20.000 Lira.

BIO resmi beroperasi sebagai bank umum pada 1 Juni 1863, sedangkan fungsinya sebagai bank sentral dimulai pada bulan Oktober 1863. Sejak Oktober 1863, pemerintah Utsmani kembali mencetak dan mendistribusikan Lira Utsmani baru ke seluruh wilayah kesultanan melalui perantara BIO. Pada tahun 1864, karena tugas BIO yang terlalu berat dalam melakukan pelayanan sebagai bank sentral dan umum sekaligus. BIO kemudian mendirikan lembaga

finansial turunan bernama Société Générale de l'Empire Ottoman (SGEO) yang bertujuan untuk melayani pinjaman pada para pedagang di Turki utsmani. Layanan pinjaman luar negeri kembali dilakukan pemerintah Utsmani pada tahun 1866 melalui perantara BIO.

Pada tahun 1863, Gubernur Danube bernama Midhat Pasha mendirikan lembaga koperasi bernama Memleket Sandıklar (Dana Tanah Air). Lembaga ini terbentuk karena rasa keprihatinan Midhat pada para petani Utsmani di provinsinya terjerat utang rentenir yang memiliki bunga tinggi. Lembaga tersebut bertujuan sebagai tempat pinjaman dana bagi para petani muslim dengan bunga yang kecil. Memleket Sandıklar terbukti sangat efektif dalam membantu petani muslim di provinsinya. Karena itu, kabar keberhasilan Midhat Pasha dalam memperbaiki perekonomian tersebar ke seluruh pelosok negeri. Oleh sebab itu, Lembaga Memleket Sandıklar disahkan dan dikelola secara nasional oleh pemerintah Utsmani pada tahun 1867. Berkat keberhasilan tersebut, Sultan Abdulaziz kemudian mengangkat Midhat Pasha sebagai Wazir pada tahun 1872 (Öztek, 2009).

Mulai awal tahun 1870-an, Turki Utsmani mengalami berbagai musibah seperti kegagalan panen, wabah penyakit, banjir bandang di beberapa provinsi, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan di semenanjung Balkan. Untuk menangani rangkaian musibah tersebut, pemerintah Utsmani melakukan kegiatan impor bahan pangan dan alat perang yang intensif kepada negara lain di Eropa. Sehingga untuk mendanai kebutuhan tersebut, pemerintah Utsmani memerintahkan kepada BIO untuk melakukan pinjaman luar negeri. Akibatnya utang yang terkumpul jumlahnya semakin membangkak (Eldem, 2005). Meskipun dihadapkan pada musibah, beberapa pejabat kesultanan yang rakus hanya memikirkan akan hartanya sendiri. Tingginya utang luar negeri Turki Utsmani juga disebabkan oleh perbuatan Khudevi Ismail (Gubernur Mesir) yang memaksa Sultan Abdulaziz untuk meminjam sekitar 100 juta Lira Utsmani kepada pemerintah Inggris dan Prancis. Khudevi Ismail terkenal sebagai pejabat yang rakus akan harta, akibatnya utang luar negeri Utsmani menumpuk dengan jumlah yang sangat besar (Gissela, 2017).

Pada tahun 1871, pemerintah Utsmani tak mampu lagi membayar utangnya secara penuh. Keadaan tesebut menyebabkan negara-negara di Eropa mulai meragukan kredibilitas pinjaman Turki Utsmani. Mereka menduga bahwa kas negara Utsmani kosong dan negara tersebut berada diambang kebangkrutan. Keadaan ini benar-benar terjadi, pada tahun 1875, Turki Utsmani berada diambang kebangkrutan. Pada masa tersebut terjadi krisis ekonomi parah dan pemerintah bahkan tidak mampu secara penuh membayar gaji karyawan kesultanannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah Utsmani kemudian memerintahkan kembali BIO untuk melakukan pinjaman baru ke negara Eropa. Namun, komite bank di Inggris dan Prancis dengan tegas menolak permintaan mereka, karena Pemerintah Utsmani belum sempat membayar utang-utangnya terdahulu. Karena penolakan ini, maka pemerintah Utsmani kemudian memerintahkan BIO untuk mencetak lebih banyak uang untuk membayar gaji pegawai kesultanan. Akibatnya nilai mata uang Turki Utsmani anjlok hingga 65% (Eldem, 2005).

Pada tahun yang sama, Turki Utsmani juga dihadapkan pada instabilitas politik. Sultan Abdulaziz meninggal dunia dan digantikan oleh saudaranya yang menjadi Sultan Murad V. Meskipun demikian Sultan Murad V hanya memerintah selama 3 bulan karena mengalami depresi. Oleh sebab itu kepemimpinan kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Hamid II. Selain dihadapkan permasalahan instabilitas politik, kesultanan Utsmani juga dihadapkan pada permasalahan jatuh tempo pembayaran hutang luar negeri. Oleh sebab itu, maka Pada tanggal 6 Oktober 1975, Wazir Mahmud Nadim Pasha memohon moratorium kepada negara-negara Eropa agar memberikan negaranya waktu untuk membayar hutang-hutang tersebut. Hal ini menimbulkan reaksi buruk dari negara-negara Eropa, mereka menganggap Utsmani telah melakukan wanprestasi dalam kegiatan pinjaman tersebut (Eldem, 2005; Pamuk, 2004). Pada bulan April 1876, Turki Utsmani dinyatakan bangkrut dengan total hutang yang tersisa sebesar £200.000.000. Ketika kabar ini mencapai negara-negara Eropa, kredibilitas pinjaman luar negeri negara tersebut lenyap dan Turki Utsmani tidak dapat kembali melakukan pinjaman sebelum hutang-hutang tersebut dapat diminimalisir (Eldem, 2005).

Perbankan Turki Utsmani Pasca Kebangkrutan

Pada April 1877, Rusia memanfaatkan kondisi perekonomian Turki Utsmani yang sedang terpuruk dengan memulai Perang Rusia-Utsmani (1877-1878). Namun karena dampak kebangkrutan dan krisis ekonomi, pemerintah Utsmani tak mampu berbuat banyak untuk mempertahankan wilayah negaranya. Karena hal itu, Turki Utsmani kalah perang dan dipaksa tunduk menandatangani Perjanjian San Stefano satu tahun kemudian. Pada perjanjian ini disebutkan bahwa pemerintah Utsmani harus menyerahkan wilayah Armenia, Georgia, dan sebagian Romania pada Rusia. Selain itu disebutkan juga bahwa Turki Utsmani harus memerdekakan negara-negara di Semenanjung Balkan yang pro-Rusia (Gencer, 2014).

Ketika kabar kekalahan Turki Utsmani tiba di negara-negara Eropa lainnya, terjadi ketegangan besar karena dengan kalahnya Utsmani maka Rusia akan menimbulkan perang besar di benua Eropa. Oleh sebab itu, Jerman berinisiatif mengundang Turki Utsmani, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya untuk bernegoisasi dalam Kongres Berlin pada tahun yang sama. Kongres tersebut kemudian menghasilkan Perjanjian Berlin (1878) dan membatalkan Perjanjian San Stefano. Perjanjian Berlin mengembalikan banyak wilayah Turki Utsmani dan kedamaian di Eropa. Meskipun demikian, Turki Utsmani tidak mendapatkan pertolongan negara-negara Eropa dengan gratis. Pada perjanjian tersebut pemerintah Utsmani juga harus tunduk pada kapitulasi yang menyerahkan kedaulatan ekonominya pada negara-negara Eropa lainnya. Sejak saat tersebut, Turki Utsmani dihina sebagai "pesakitan dari Eropa" karena kondisinya yang lemah dan tunduk pada negara-negara Eropa lainnya (Gencer, 2014).

Menyadari sekutunya dalam bahaya, pemerintah Prancis melakukan kontak kembali dengan Turki Utsmani untuk membahas urusan pelunasan utang dan perbaikan ekonomi pasca kebangkrutan. Karena investor Inggris dan Prancis secara bersamaan memegang 90% utang luar negeri Turki Utsmani, pemerintah Turki Utsmani tidak dapat berbuat banyak mengenai nasib mereka selanjutnya. Untuk mematuhi kapitulasi, pemerintah Utsmani menyerahkan urusan utang mereka pada para investor asing. Untuk memperbaiki perekonomian Utsmani pasca kebangkrutan, para investor Inggris dan Prancis menyarankan agar perwakilan negaranya turun tangan secara langsung memperbaiki perekonomian. Namun Sultan Abdul Hamid II yang waspada dengan hancurnya perekonomian Mesir pasca intervensi bangsa asing menolak permintaan tersebut. Karena itu, pemerintah Utsmani berunding dengan investor dalam negeri, Prancis, dan Inggris untuk membahas proses pelunasan pinjaman (Tunçer, 2020).

Pada bulan November 1879, pemerintah Turki Utsmani melakukan pertemuan dengan para kreditur dan BIO untuk membahas pinjaman dalam dan luar negeri kesultanan yang menumpuk. Hasil pertemuan menghasilkan keputusan bahwa pemerintah Turki Utsmani harus menyerahkan pajak bea cukai, minuman keras, perikanan, sutra, garam, dan tembakau untuk dikelola BIO dan para kreditur. Dengan kata lain, satu per lima pajak Turki Utsmani harus dikeluarkan untuk membayar utang yang sudah menumpuk. Walaupun demikian, pemerintah Turki Utsmani tak punya pilihan lain sehingga mereka menyanggupi permintaan tersebut dan mengizinkan BIO serta para kreditur untuk memulai kegiatannya (Tunçsiper dan Abdioglu, 2019).

Setelah melalui masa percobaan, utang dalam negeri dengan investur lokal berhasil ditangani dengan baik. Karena keberhasilan tersebut, pemerintah Utsmani kemudian melakukan negosiasi dengan para investor asing. Utang yang awalnya senilai £215,500,000 dapat turun menjadi £128,600,000, serta bunga tahunan yang awalnya senilai £13,600,000 turun menjadi £2,700,000 per tahun. Melihat keberhasilan tersebut, pemerintah Turki Utsmani kembali melakukan pertemuan dengan para kreditur dan membahas pembentukan lembaga pembayaran utang negara pada bulan November 1880. Setelah melalui serangkaian pertemuan, akhirnya Sultan Abdul Hamid II mengesahkan Dekrit Muharram (Muharrem Decree) pada tanggal 20 Desember 1881 dan menandai berdirinya lembaga Ottoman Public Debt Administration (OPDA) atau Duyun-u Umumiye İdaresi (Tunçsiper dan Abdioglu, 2019). OPDA sejak awal berdiri merupakan lembaga multinasional yang dipegang oleh investor perbankan Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Italia, Austria, dan Utsmani. Terdapat tiga bank yang menjadi investor terbesar aktivitas OPDA yakni BIO, Deutsche Bank, dan Bank of England. Keberadaan

lembaga ini sangat efektif dalam membayar utang luar negeri Utsmani. Tercatatat sejak tahun 1882 hingga 1914, lembaga OPDA berhasil membayar £130.000.000 utang luar negeri Turki Utsmani (Tunçsiper & Abdioglu, 2019).

Sekitar awal tahun 1880-an, terjadi perubahan dalam batang tubuh BIO. BIO yang awalnya merupakan bank sentral kerjasama Inggris-Prancis-Utsmani berubah menjadi perusahaan dominasi Prancis. Hal ini semakin jelas dengan pembelian 80% kepemilikan saham BIO oleh investor Prancis. Selain itu, komite bank di Paris juga semakin menunjukkan keinginannya untuk ikut campur dalam urusan perekonomian Utsmani. Melalui BIO, para investor Prancis mendikte pemerintah Utsmani untuk mendirikan banyak fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, pertambangan, dan lainnya hingga tahun 1902 (Tunçsiper & Abdioglu, 2019).

Pada tahun 1883, setelah melihat bank sentralnya diambil alih oleh negara asing, terjadi inisiasi oleh pemerintah Turki Utsmani untuk mendirikan banknya sendiri tanpa campur tangan negara asing. Setelah mengetahui bahwa dana yang digelontorkan Memleket Sandıklar tidak tepat sasaran. Pada tahun yang sama pemerintah Utsmani membentuk undang-undang kredit terencana yang terdiri dari 29 ayat. Dengan memakai undang-undang ini, pemerintah Utsmani mengubah status Memleket Sandıklar dari lembaga kredit saja menjadi bank. Pada tahun 1888, Memleket Sandıklar resmi diubah statusnya menjadi bank negeri bernama Bank Ziraat (Ziraat Bankasi). Bank Ziraat menjadi bank pertama yang dibuat pemerintah Utsmani tanpa intervensi investor asing. Bank Ziraat dikenal pula dengan nama Türkiye Cumhuriyeti Ziraat yang berarti Bank Pertanian Turki. Bank ini dibentuk sebagai sebagai tempat para petani untuk melakukan pinjaman modal usaha (Öztek, 2009).

Sejak didirikan pada tahun 1888, pemerintah pusat mulai membangun lebih dari 400 cabang Bank Ziraat di seluruh wilayahnya. Setiap kantor cabang dikepalai oleh ketua direktur yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Adapun struktur organisasi Bank Ziraat terdiri dari ketua direktur, asisten direktur, dua perwakilan dari dinas kota, dan dewan administrasi tanpa gaji yang terdiri dari pengawas pertanian lokal (ziraat miifettisi). Bank Ziraat memiliki beberapa peraturan dalam kegiatan pinjaman. Pertama, pinjaman bank memiliki bunga sebesar 6%. Kedua, pinjaman hanya dibatasi hingga 3 tahun (kecuali Bank Ziraat pusat di Istanbul yang bisa memberikan pinjaman hingga 10 tahun). Ketiga, maksimal nominal pinjaman dibatasi hingga 150 Lira Utsmani saja (Öztek, 2009).

Mulai tahun 1890-an, hubungan antara pemerintah Turki Utsmani dengan bankir Inggris dan Prancis tidak akur. Hal ini disebabkan karena permasalahan status suku Armenia, pada satu sisi Turki Utsmani berusaha keras untuk mempertahankan Armenia agar tetap bertahan dengan kesultanan, namun disisi lain Inggris dan Prancis menginginkan agar Armenia lepas dari kesultanan. Karena kecewa tak dapat merdeka akibat ditandatanganinya Perjanjian Berlin (1878), para penduduk Armenia melakukan gerakan pemberontakan untuk melepaskan suku bangsanya dari kesultanan Turki Utsmani. Karena itu terjadi pemberontakan di timur semenanjung Anatolia. Untuk menghentikan pemberontakan, pemerintah Utsmani melakukan pembantaian pemberontak pada tahun 1895 yang dikenal dengan Hamidian Massacre. Ketika berita ini tersebar ke Inggris dan Prancis, keduanya mengecam perbuatan tersebut dan hendak melakukan embargo ekonomi jika Armenia tidak diberi kemerdekaan. Namun upaya tersebut tidak dapat dilakukan karena mereka khawatir dengan keselamatan warga Inggris dan Prancis yang bekerja di BIO.

Pada tahun 1896, terjadi dua insiden yang menyebabkan renggangnya hubungan pemerintah Utsmani dengan BIO. Insiden pertama terjadi saat pemerintah Utsmani meminta BIO untuk mengeluarkan 150.000 Lira Utsmani dari kas negara untuk membayar pegawai gendarmerie di Makedonia. Namun BIO tak dapat langsung menyetujui permintaan menteri keuangan melainkan harus menunggu persetujuan komite Prancis. Karena terlalu lama, akhirnya menteri keuangan melakukan pinjaman pada bankir Jerman tanpa sepengetahuan directore generale. Akibat tindakan tersebut, komite BIO di Paris mengecam tindakan menteri keuangan melalui surat (Edhem, 1998). Sedangkan insiden kedua ialah pendudukan gedung BIO oleh pemberontak Armenia. Pada 28 Agustus 1896, sekelompok pemberontak menduduki gedung BIO di Istanbul. Setelah pemberontak berhasil dikalahkan, para pemberontak yang

masih hidup diungsikan ke Prancis. Meskipun pemerintah Utsmani meminta berkali-kali agar para teroris tersebut diserahkan untuk dihukum. Pemerintah Prancis menolak keinginan tersebut, bahkan media disana memuji keberanian para pemuda Armenia untuk merebut kemerdekaannya. Karena itu pemerintah Utsmani geram dan berusaha mencoba mencari mitra dari negara lainnya.

Pada akhir 1890-an, Sultan Abdul Hamid II berkeinginan untuk membangun jalur rel kereta yang menyambungkan kota Istanbul hingga Mekkah. Hal ini dilandasi karena lamanya waktu perjalanan yang harus ditempuh rakyatnya ketika melakukan ibadah haji. Dengan demikian dengan modal seadanya dari Bank Ziraat, Sultan menggunakan 100.000 Lira Utsmani untuk membangun jalur rel kereta api hingga ke Bagdhad. Meskipun demikian, dana yang dibutuhkan masih tidak mencukupi untuk mencapai kota Mekkah. Karena itu ia menyerukan pada umat Muslim di seluruh dunia untuk menyumbangkan harta bendanya guna keberhasilan pembangunan rel kereta. Melihat kondisi yang baik untuk mencari sekutu, pemerintah Jerman memanfaatkan situasi dengan menginvestasikan dana pembangunan rel kereta api melalui Deutsche Bank. Berkat bantuan ini, pemerintah Utsmani dapat membangun jalur rel kereta api hingga Kota Madinah pada tahun 1907. Hal inilah yang memulai kedekatan pemerintah Utsmani dengan Jerman.

Pada tahun 1908, terjadi revolusi Turki Muda yang memulai pemerintahan monarki konstitusional di Utsmani. Untuk mengembalikan hubungan BIO dengan pemerintah, Deffes, Directore Generale BIO yang berkuasa pada saat tersebut melakukan kontak kembali dengan pemerintah pusat dan BIO bersedia membantu perekonomian penguasa baru Utsmani lagi. Setelah beberapa hari, surat lalu diterima oleh Menteri keuangan Cavid Bey. Ia menolak kerjasama lebih lanjut dengan BIO, karena ia merasa bank tersebut hanya memanfaatkan perekonomian Utsmani secara sepihak. Ia kemudian lebih memilih bekerjasama dengan perbankan Jerman ketimbang menggunakan BIO. Akibatnya BIO kehilangan banyak pengaruh dalam keuangan Turki Utsmani hingga berakhirnya PD I (Edhem, 1998).

Perhatian pemerintah Turki Utsmani lalu tertuju pada Deutsche Bank. Deutsche Bank berdiri di Utsmani pada tahun 1909. Sejak pinjaman tahun 1908, pemerintah Turki Utsmani tidak lagi menggunakan BIO sebagai agen pinjaman dan beralih ke Deutsche Bank. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaan Deutsche Bank yang cepat dan harga yang terjangkau (Bank Jerman hanya mengambil 81% keuntungan sedangkan bank Prancis mengambil 84%) (Conte, 2014). Oleh sebab itu, Deutsche Bank dengan cepat dapat mendirikan banyak cabangnya di Turki Utsmani. Menjelang perang dunia kesatu, tercatat terdapat 80 cabang Deutsche Bank di seluruh wilayah Utsmani (Deutsche Bank, 2009).

Pada tahun 1914, Turki Utsmani bergabung dengan blok sentral dalam perang dunia ke-1. Untuk membiayai kebutuhan perang, Jerman kemudian memberikan bantuan sebesar 3.5 milyar Mark kepada pemerintah Turki Utsmani. Sebagai balasan terima kasih atas bantuan tersebut, pemerintah Utsmani kemudian semakin mempererat hubungannya dengan Deutsche Bank, dan secara de facto mengganti kewenangan bank sentral dari BIO ke Deutsche Bank. Pemindahan kewenangan bank sentral BIO ke Deutsche Bank bertujuan agar Utsmani dapat leluasa melakukan transaksi maupun pertukaran dana dengan Jerman. Selain bertindak sebagai bank sentral dikala perang, Pemerintah Utsmani juga memberikan kewajiban bagi Deutsche Bank untuk menyuplai emas sebagai biaya perang Utsmani di Mesopotamia. Salah satu cabang Deutsche Bank yang paling produktif di Utsmani pada masa tersebut ialah cabang di Baghdad. Sejak didirikannya cabang di badghad, Deutsche Bank mendapatkan banyak keuntungan, sebab bank disana dapat membeli emas dan perak dengan jumlah yang besar dari para ziarawan di Karbala (Deutsche Bank, 2009).

Pada tanggal 23 Maret 1916. Pemerintah Turki Utsmani melakukan reformasi terhadap Bank Ziraat dengan disahkannya Undang-undang Ziraat Bankasi 1916, Isinya terdiri dari 6 bab dan 92 ayat. Secara garis besar, perubahan yang dilakukan antara lain: pembentukan tim direktur sebanyak empat orang, Larangan petugas bank untuk memberikan jaminan pada nasabah, nasabah yang tidak mampu membayar hutang tepat waktu tidak dapat menjadi dewan bank, larangan bagi manager dan petugas bank untuk membeli barang yang dilelang Bank

Ziraat, dan dana pinjaman kini terbuka untuk siapa saja termasuk para pegawai bank. Undang-undang ini mulai diterapkan pada tanggal 21 Mei 1917 (Öztek, 2009).

Penyerangan Inggris ke wilayah Utsmani di Dardanelles pada akhir 1915 menyebabkan melemahnya kekuatan pasukan Utsmani pada saat tersebut. Untuk mengatasi terjadinya hal-hal buruk, Deutsche Bank berencana untuk memindahkan pegawai cabang Istanbul ke wilayah pedalaman Turki Utsmani di Anatolia. Meskipun demikian, rencana tersebut tak terwujud sebab blok sentral mengalami kekalahannya pada tahun 1918 dan Deutsche Bank cabang Istanbul berhasil diduduki tentara sekutu. Pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris dan Prancis memasuki kota Istanbul pada 13 November 1918. Langkah selanjutnya yang dilakukan pasukan sekutu ialah menduduki Deutsche Bank di Istanbul, hal ini dilakukan agar aliran dana Utsmani dan Jerman dapat terputus (Deutsche Bank, 2009).

Pada bulan Maret 1919, seluruh cabang Deutsche Bank di Turki Utsmani dibubarkan dan dilikuidasi. Begitupun dengan brankas-brankas uang yang dijarah pasukan sekutu pada Mei 1919. Setelah dihitung jumlahnya tercatat sebanyak 704 brankas berhasil diamankan dan dibawa ke Galata. Selain itu, pada saat yang bersamaan pegawai-pegawai Jerman Deutsche Bank juga diusir kembali ke negaranya. Meskipun demikian, tak seluruh pegawai Deutsche Bank dipulangkan kembali ke negaranya. Inggris memanfaatkan beberapa pegawai Deutsche Bank untuk dimasukan kedalam kepegawaian BIO. Proses ini memakan waktu satu tahun hingga tahun 1920 (Deutsche Bank, 2009). Sebagai upaya damai dengan pasukan sekutu, pemerintah Utsmani kemudian menandatangani perjanjian Sevres pada tahun 1920. Namun hal ini ditentang oleh Mustafa Kemal Attaturk, ia kemudian mengumpulkan tentara Turki untuk memukul mundur tentara sekutu dan membatalkan perjanjian tersebut. Setelah berhasil mengalahkan sekutu pada tahun 1921, Mustafa Kemal Attaturk kemudian diangkat menjadi ketua Majelis Nasional (Hayati, 2017).

Pada tahun 1922, Dewan nasional di bawah pimpinan Mustafa Kemal Attaturk (1922-1938 M) membubarkan Kesultanan Utsmani, meskipun demikian ia mengangkat Sultan Abdul Majid II menjadi Khalifah Utsmani di Turki. Khalifah pada masa tersebut hanya sebagai simbol agama dan penasehat pemerintah. Pada tanggal 24 Juli 1923, pemerintah Republik Turki dan sekutu menandatangani perjanjian Lausanne. Penandatanganan perjanjian tersebut mengakhiri perang kemerdekaan Turki dan pasukan sekutu mulai meninggalkan Turki sejak Agustus 1923. Perekonomian akhirnya dapat kembali stabil. Oleh sebab itu, maka pimpinan pusat Deutsche Bank kembali menghubungi pemerintah Turki untuk mendirikan kembali Deutsche Bank di Turki. Pemerintah Turki kemudian mengizinkan para investor Jerman untuk mendirikan kembali Deutsche Bank di Turki dengan jumlah sebanyak 13 cabang (Deutsche Bank, 2009).

Mustafa kembali merubah pikirannya untuk menampung sultan Utsmani. Untuk menghindari kontra revolusioner dari para pendukung pan-islamisme, maka mustafa membubarkan kekhalifahan dan mengusir Sultan Abdulmajid II dari Turki. Pada tahun yang sama, dua bank peninggalan Turki Utsmani yakni BIO dan Bank Ziraat diturunkan statusnya menjadi bank umum swasta. Nama BIO kemudian diubah menjadi Ottoman Bank. Meskipun statusnya diturunkan, Ottoman Bank menjadi bank sentral Republik Turki dan memproduksi uang di Turki hingga dibentuknya Bank Sentral Republik Turki pada tahun 1933 (Baruh, 2019; Öztek, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diketahui terdapat lima bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Turki Utsmani yakni Banque de Constantinople, Ottoman Bank, Banque Imperiale Ottomane (BIO), Bank Ziraat, dan Deutsche Bank. Bank modern yang ada di Turki Utsmani terdiri dari bank sentral dan bank umum. Perbankan di Turki Utsmani memiliki beberapa peran yakni sebagai lembaga simpan pinjam, investor pembangunaan fasilitas umum, lembaga pembayaran utang luar negeri (OPDA), mempermudah hubungan ekonomi internasional, dan lain sebagainya. Dari empat bank yang disebutkan, hanya satu bank saja yang murni didirikan pemerintah dan rakyat Utsmani yakni Bank Ziraat. Keempat bank lainnya merupakan kerjasama antar pemerintah Utsmani dengan investor asing. Selain peran yang

dijelaskan sebelumnya, perbankan modern juga digunakan oleh negara-negara adidaya Eropa untuk menancapkan pengaruhnya di Turki Utsmani.

REFERENSI

Alharbi, A. (2015). Development of the Islamic Banking System. Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1). https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2

Baruh, L. T. (2019). The Imperial Ottoman Bank. Retrieved from https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/en/imperial-ottoman-bank

Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). Bank dan lembaga keuangan lain. Jakarta: Salemba empat.

Clay, C. (1993). The Bank Notes of the Imperial Ottoman Bank, 1863-1876. New Perspectives on Turkey, 9, 101–118. https://doi.org/10.1017/s0896634600002235

Clay, C. (1994). The origins of modern banking in the levant: The branch network of the imperial ottoman bank, 1890-1914. International Journal of Middle East Studies, 26(4), 589–614. https://doi.org/10.1017/S0020743800061122

Conte, G. (2014). Regaining Control Over Finance: the Ottoman Empire at the eve of the First World War. Новейшая История России, 4(11), 15–28.

Deutsche Bank. (2009). A Century of Deutsche Bank in Turkey. Frankfurt: Aksoy Publishing.

Dzuhryansyah, A. (2014). Pembaharuan Negara Turki Pasca Keruntuhan Khilafah Turki Usmani. Retrieved from http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-8/20392790-MK-Aldo Dzuhryansyah.pdf

Edhem, E. (1998). The Imperial Ottoman Bank : Actor or Instrument of Ottoman Modernization? Structure.

Eldem, E. (2005). Ottoman financial integration with Europe: Foreign loans, the Ottoman Bank and the Ottoman public debt. European Review, 13(3), 431–445. https://doi.org/10.1017/S1062798705000554

Geo, S. A., Desya, P. S., & Prisilia, P. (2023). Implementasi Green Banking Terhadap Perbankan. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi, 3(1), 61–68.

Gissela, T. (2017). Pemikiran gerakan Turki Muda dalam upaya menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M).

Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press.

Hayati, E. H. (2017). Kebijakan Politik Mustafa Kemal Ataturk terhadap Suku Kurdi di Turki 1923-1938 M. Buletin Al-Turas, 23(2), 231–250. https://doi.org/10.15408/bat.v23i2.6374

Hossain, I. (2014). Regulatory compliance of IFRS #7 of the banks' disclosures: a case study on the nationalized commercial banks of Bangladesh. Banglavision, 13(1), 186–201.

Karademir, E. (2007). Between stumbling and fall towards insolvency : the endeavors of the Ottoman Empire in the 19th century. (December).

Kurylowicz, L. (2017). Short History of Banking and Prospects for Its Development in Poland at the Beginning of the 21st Century. SSRN Electronic Journal, (February). https://doi.org/10.2139/ssrn.3051610

Öztek, Ö. S. (2009). The Foundation And The First 50 Years Of "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi" (The Agricultural Bank Of The Turkish Republic) (1863-1929).

Pamuk, Ş. (2004). The evolution of financial institutions in the Ottoman Empire, 1600-1914. Financial History Review, 11(1), 7–32. https://doi.org/10.1017/S0968565004000022

Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, S. (2014). Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sjamsuddin, H. (2012). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

Tunçsiper, B., & Abdioglu, H. (2019). The Ottoman Public Debt Administration (OPDA) in Debt Process of Ottoman Empire ". (December 2018).

Tuncsiper, B., Tay, A., & Bayramoglu, F. M. (2007). Ottoman Empire's Debt Management In 19th Century And Role Of The Galata Bankers. (May 2016), 1–20. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3521.8800

Worringer, R. (2004). "Sick man of Europe" or "Japan of the near east"?: Constructing Ottoman modernity in the Hamidian and young Turk eras. International Journal of Middle East Studies, 36(2), 207–230. https://doi.org/10.1017/S0020743804362033

Yatim, B. (2014). Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II. Jakarta: RajaGrafindo Persada.